

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Tak dapat disangkal bahwa nilai-nilai dan norma-norma di dalam masyarakat berperan penting untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan. Upaya untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan tersebut tidak hanya terbatas pada pemahaman teoretis dan aksiologis, tetapi juga mesti direalisasikan melalui praktik sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang bernaung di bawah payung Pancasila, upaya untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan tersebut terinspirasi dari sila kelima Pancasila. Keutuhan dan keharmonisan bisa tercapai apabila falsafah hidup Pancasila yang bercirikan keadilan dalam sila kelima dapat dipahami dan direalisasikan secara baik dalam kehidupan bermasyarakat. Secara khusus sila kelima Pancasila menginspirasi setiap individu untuk menciptakan masyarakat sosial yang memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keseimbangan itu tidak semata-mata berhubungan dengan pemenuhan hak tiap individu, tetapi juga berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban.

Keadilan sosial merupakan sifat masyarakat adil dan makmur dan berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penghisapan, bahagia material dan bahagia spiritual, lahir dan batin.¹ Istilah adil memiliki arah tujuan yang pasti bagi masing-masing individu untuk lebih tahu apa yang menjadi hak dari orang lain sehingga tidak ada tindakan individualistik dan egoistik dan secara pasti pula membuat individu mengetahui haknya sekaligus kewajibannya. Sedangkan istilah sosial juga memberikan arahan yang pasti kepada individu bahwa kepentingan diri sendiri tidak dapat diberlakukan dalam relasi sosial yang tentu mengutamakan keutuhan dan keharmonisan.

Prinsip keadilan sosial mengharuskan atau mengusahkan kemakmuran yang merata bagi semua orang. Berdasarkan prinsip tersebut, tindakan yang adil dalam

¹H. Sunoto, *Mengenal Filsafat Pancasila: Pendekatan Melalui Etika Pancasila* (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 1981), hlm. 7.

ruang lingkup kemasyarakatan juga mengarahkan setiap individu dalam masyarakat untuk melindungi kaum yang lemah. Hal ini tidak berarti bahwa kaum yang lemah tidak perlu bekerja atau hanya sekedar dilindungi begitu saja. Namun, upaya perlindungan terhadap kaum yang lemah pada akhirnya perlu memperhatikan aspek pemberdayaan agar mereka dapat mengaktualisasikan diri menurut potensinya masing-masing. Upaya ini dapat dilihat sebagai suatu usaha untuk membentengi diri dari kekuasaan yang opresif. Hal tersebut tampak dalam Pancasila khususnya sila kelima yang menegaskan bahwa pemimpin perlu berlaku adil kepada rakyat dan tidak pilih kasih.²

Dalam kehidupan masyarakat sosial sekarang ini, secara tidak langsung pemimpin dan yang dipimpin membentuk kelas-kelas sosial yang dicirikan dengan ketimpangan antara hak dan kewajiban. Soekarno mengidentikkan keadilan sosial dengan Sosialisme yang ditandai dengan keberadaan masyarakat tanpa kelas yang membatasi tindakan dari masing-masing individu. Hal tersebut merupakan bentuk realisasi dari sila kelima Pancasila yang memungkinkan terhapusnya penindasan dan penghisapan seorang manusia atas manusia lain. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam praksisnya tentu tidak hanya memperjuangkan keadilan secara materiil tetapi juga berurusan dengan aspek nonmateriil.

Masyarakat memang tidak bisa dilepaspisahkan dari kebudayaan. Kenyataannya, masyarakat dan kebudayaan saling mengandaikan satu sama lain. Di satu pihak kebudayaan mengandaikan keberadaan masyarakat dan di pihak lain tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan karena kebudayaan itu sendiri merupakan produk manusia yang juga merupakan anggota masyarakat.³ Di dalam masyarakat kekuasaan yang dimiliki masing-masing individu berbeda-beda satu sama lain. Hal tersebut terlihat jelas dalam stratifikasi sosial dalam ruang lingkup adat istiadat atau budaya yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Stratifikasi sosial didasarkan pada kekayaan, pendidikan, jabatan ataupun keturunan. Stratifikasi sosial tersebut menyebabkan ketidakadilan di dalam masyarakat baik

Ibid., hlm. 105.

³Bernard Raho, *Sosiologi* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2016), hlm. 176.

secara materiil maupun nonmateriil. Kelompok yang berkuasa kerap kali bersikap otoriter dengan menabrak nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat sementara kaum yang lemah menjalankan ketaatan buta terhadap nilai dan norma yang sama. Akibatnya, kebebasan kaum lemah untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih baik pun dibatasi.

Acara adat *tiwo iko* merupakan suatu produk kebudayaan masyarakat Jawapogo yang melibatkan anggota masyarakat dengan berbagai macam latar belakang sosial. Acara adat *tiwo iko* diadakan untuk menghasilkan kesepakatan secara bersama dan bertujuan untuk menghindari pertentangan antaranggota masyarakat dalam memberikan pendapat yang berbeda-beda. Acara adat ini diadakan menyongsong seremoni-seremoni adat yang akan terjadi. Acara adat *tiwo iko* dipimpin langsung oleh ketua adat yang disebut dengan *mosalaki*. *Mosalaki* dipercaya sebagai seseorang yang memiliki hak atau otoritas penuh untuk memutuskan pendapat yang disetujui dan tidak disetujui. *Mosalaki* memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada anggota masyarakat lainnya yang terlibat dalam acara adat tersebut. Dalam upacara adat *tiwo iko*, *mosalaki* juga memiliki hak untuk membagi-bagi tanggungan dari setiap anggota masyarakat. Dalam upacara adat *tiwo iko*, tanggungan dalam persiapan seremoni-seremoni adat yang akan dilaksanakan dapat berupa hewan kurban atau sejumlah uang tergantung dari status sosial anggota masyarakat Jawapogo dalam adat-istiadat seperti *ana weta*, *sa'o tenda*, *ndue ndole*, dan *ebu mame*. Dengan kata lain, semua orang yang terlibat dalam upacara adat *tiwo iko* memiliki tanggungan masing-masing.

Upacara adat *tiwo iko* bertujuan untuk menyejahterahkan dan menciptakan musyawarah yang demokratis dalam masyarakat Jawapogo. Musyawarah yang demokratis dalam upacara adat tersebut ditandai dengan partisipasi anggota masyarakat dalam memberikan pendapat atau mendiskusikan jenis atau jumlah tanggungan untuk seremoni-seremoni adat yang akan dilaksanakan. Namun, kerap kali upacara adat *tiwo iko* didominasi dan dideterminasi oleh kelompok yang memiliki kekuasaan yang cenderung otoriter. Akibatnya, gagasan-gagasan yang diutarakan oleh kelompok yang lebih lemah tidak mendapat tempat dalam upacara

adat *tiwo iko*. Realitas ini menunjukkan bahwa status sosial merupakan aspek yang menentukan dalam upacara adat *tiwo iko*. Tidak heran bahwa kelompok yang kuat akan dengan mudah menggolkan gagasannya sementara kelompok yang lemah hanya bisa tunduk secara buta terhadap gagasan kelompok yang kuat.

Akhir-akhir ini, dalam upacara adat *tiwo iko*, tanggungan yang dibebankan kepada anggota masyarakat yang berstatus sebagai *ana weta* tidak mempertimbangkan keadaan ekonomi kelompok yang bersangkutan. Tentu saja pembagian tanggungan yang tidak adil ini menambah penderitaan kelompok *ana weta* yang keadaan ekonominya sulit. Di sisi lain, tanggungan yang besar tidak akan menjadi masalah yang berarti bagi kelompok *ana weta* yang keadaan ekonominya sejahtera.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan Pancasila sebagai falsafah hidupnya, substansi keadilan sosial adalah kesetaraan hidup sosial bagi seluruh manusia di Indonesia. Implikasi praktisnya ialah “hormat terhadap kebebasan manusia” dan “pembebasan manusia”.⁴ Hormat terhadap kebebasan manusia merupakan upaya untuk menghargai kebebasan individu sekaligus tidak mengancam kebebasan individu lainnya. Sementara itu, keadilan sosial membantu manusia untuk bisa keluar dari penderitaan akibat ketidakadilan materiil dan spiritual. Dalam kaitannya dengan itu, penulis menemukan adanya reduksi terhadap keadilan sosial dalam upacara adat *tiwo iko* dewasa ini. Maka, penulis hendak menyoroti makna upacara adat *tiwo iko* dalam masyarakat Jawapogo berdasarkan perspektif sila kelima Pancasila lewat sebuah karya akademik berjudul “Makna Upacara Adat *Tiwo Iko* Ditinjau dari Perspektif Sila Kelima Pancasila dan Implikasinya bagi Kehidupan Masyarakat Jawapogo”.

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, rumusan masalah dalam karya ilmiah ini dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Siapa itu masyarakat Jawapogo?

⁴Andreas D. Bolo, Bartolomeus Samho, Stephanus Djunatan, Sylevester Kanisius Laku, *Pancasila Kekuatan Pembebas* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2012), hlm. 252.

2. Bagaimana proses upacara adat *tiwo iko*?
3. Apa isi sila kelima Pancasila?
4. Apa makna upacara adat *tiwo iko* berdasarkan perspektif sila kelima Pancasila?
5. Apa implikasi makna upacara adat *tiwo iko* bagi masyarakat Jawapogo?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan umum penulisan skripsi ini ialah:

1. Mendeskripsikan secara umum masyarakat Jawapogo.
2. Mendeskripsikan secara komprehensif upacara adat *tiwo iko* dalam masyarakat Jawapogo.
3. Menguraikan isi sila kelima Pancasila.
4. Menguraikan makna upacara adat *tiwo iko* ditinjau dari perspektif sila kelima Pancasila.
5. Menguraikan implikasi makna dari upacara *tiwo iko* bagi masyarakat Jawapogo.

1.4 Manfaat Penulisan

Melalui tulisan ini penulis hendak mengembalikan marwah upacara adat *tiwo iko* dalam masyarakat Jawapogo yang telah direduksi untuk kepentingan kelas sosial yang lebih tinggi. Selain itu, lewat tulisan ini penulis juga hendak berkontribusi secara intelektual untuk memperkaya literatur atau kajian kritis tentang upacara adat *tiwo iko* dalam masyarakat Jawapogo baik untuk kelompok atau tokoh masyarakat maupun untuk generasi yang akan datang. Skripsi ini juga ditulis untuk memenuhi salah satu dari beberapa persyaratan guna memperoleh gelar strata satu filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Sumber Data

Dalam penulisan karya tulis ini penulis menggunakan dua sumber data penelitian yakni data primer dan data sekunder. Data primer ini diperoleh

langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara terhadap tokoh-tokoh adat yang disebut sebagai *mosalaki*. Para narasumber t menjadi informan kunci dalam penelitian ini dikarenakan pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap upacara adat *tiwo iko*. Objek dalam data primer yakni bagaimana proses pelaksanaan upacara adat *tiwo iko*, bagaimana latar belakang munculnya upacara adat *tiwo iko*, dan apa makna upacara adat *tiwo iko* bagi masyarakat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku yang dijadikan referensi melalui literatur-literatur.

1.5.2 Prosedur Pengumpulan Data

Ada beberapa tahap prosedur pengumpulan data penelitian yang yang digunakan oleh penulis. Tahap-tahap tersebut antara lain, *pertama*, tinjauan literatur dan konsultasi dengan ahli. Tahap ini, penulis mengumpulkan informasi-informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian. Informasi-informasi tersebut dapat diperoleh melalui literatur atau konsultasi dengan ahli. Tahap ini juga penulis menghubungi 10 narasumber kunci dalam proses penelitian.

Kedua, mempelajari dan melakukan pendekatan terhadap kelompok masyarakat yang menjadi sumber data dikumpulkan. Tahap ini penulis lakukan agar dapat diterima oleh kelompok-kelompok narasumber dan memahami kebiasaan di dalamnya seperti cara mereka berpikir, bahasa yang sering digunakan, dan waktu luang mereka. *Ketiga*, merumuskan dan menyusun pertanyaan. Pada tahap ini, penulis sudah memutuskan prosedur pengumpulan data secara sampel pada masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan oleh penulis berkaitan dengan tujuan penelitian sehingga mengandung makna yang signifikan dan substantatif.

Keempat, merekam dan memberi kode. Tahap ini, penulis berupaya untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dari setiap narasumber dan perekaman tersebut diberi kode untuk memudahkan proses analisis dan data yang masih diragukan kebenarannya. *Kelima*, pengorganisasian data yang sudah terkumpul supaya dapat dianalisis. Pada tahap ini, penulis berupaya mengkoordinasikan data-data yang sudah terkumpul dan menganalisis data-data yang diperoleh dari narasumber.

1.5.3 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam karya tulis ini adalah wawancara. Proses wawancara dalam penelitian ini penulis menanyakan langsung dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara umum tulisan akademik ini terdiri dari lima bab yang dapat penulis uraikan sebagai berikut. Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan. Bab kedua berisikan uraian selayang pandang tentang masyarakat Jawapogo dalam berbagai dimensi. Bab ketiga memuat deskripsi tentang upacara adat *tiwo iko* . Bab keempat, penulis mengulas tentang isi Pancasila dan makna upacara adat *tiwo iko* dalam perspektif sila kelima Pancasila dan implikasinya bagi masyarakat Jawapogo. Bab kelima, berisikan kesimpulan sebagai rangkuman singkat mengenai keseluruhan tulisan dan usul saran.